

ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA

Lukas Aji Gabe Manggora Aruan
NPP. 29.1782

*Asdaf Kabupaten Merauke, Provinsi Papua
Program Studi Keuangan Publik*

Email: ajigabe9@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The low regional original income (PAD) of Merauke Regency has resulted in the high level of dependence of the regional government on transfer funds from the central government. Purpose:* This study aims to determine the level of regional financial capacity of Merauke Regency in supporting the implementation of regional autonomy during the 5-year budget period seen from financial ratio analysis and to determine the factors that affect the regional financial capacity and the efforts made in order to improve the regional financial capacity. **Method:** *The method used in this research is descriptive qualitative with an inductive approach. The data used in this study is the Merauke Regency APBD Realization Report as secondary data and the results of interviews from Merauke Regency BPKAD officials as primary data. Data analysis uses data reduction analysis methods, data presentation, data description through financial ratio analysis: the ratio of the degree of fiscal decentralization, the ratio of financial independence, the ratio of regional financial dependence, and the ratio of the effectiveness of local revenue management, and drawing conclusions. Result:* The results showed that the level of ability. Merauke Regency's regional finances are still low, especially during the 5-year budget period, namely from 2016-2020 with an average fiscal decentralization ratio of 7.67%, the ratio of the degree of regional financial dependence to 83.24%, the ratio of financial independence to 9.19%, but in terms of the effectiveness of PAD management, it has shown good results with a figure of 94.68%. **Conclusion:** *% Based on the results of the analysis, strategic efforts from the Regional Government are needed which can be carried out by empowering regional potentials that can be used as sources of regional income and also in the form of extensification or intensification of existing sources of regional income, especially in regional taxes.*

Keywords: *Financial Analysis, Financial Capability, Regional Autonomy*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Rendahnya pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Merauke berakibat pada tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Merauke dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah selama 5 tahun periode anggaran yang dilihat dari analisis rasio keuangan serta untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kemampuan keuangan daerah dan upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan

Realisasi APBD Kabupaten Merauke sebagai data sekunder dan hasil wawancara dari Pejabat BPKAD Kabupaten Merauke sebagai data primer. Analisis data menggunakan metode analisis reduksi data, penyajian data, deskripsi data melalui analisis rasio keuangan: rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan, rasio ketergantungan keuangan daerah, dan rasio efektivitas pengelolaan pendapatan asli daerah, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Merauke masih rendah khususnya selama 5 tahun periode anggaran yaitu dari tahun 2016-2020 dengan rata-rata rasio derajat desentralisasi fiskal 7,67%, rasio derajat ketergantungan keuangan daerah 83,24%, rasio kemandirian keuangan 9,19%, namun dalam hal efektivitas pengelolaan PAD sudah menunjukkan hasil yang baik dengan angka 94,68%. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil analisis diperlukan upaya strategis dari Pemerintah Daerah yang dapat dilakukan dengan cara pemberdayaan potensi daerah yang bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah dan juga dalam bentuk ekstensifikasi maupun intensifikasi terhadap sumber pendapatan daerah yang ada terutama dalam pajak daerah.

Kata kunci: Analisis Keuangan, Kemampuan Keuangan, Otonomi Daerah.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara umum pelaksanaan otonomi daerah adalah pemberian kemandirian bagi daerah-daerah otonomi agar dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat dan sesuai dengan SOP (Standard Operating Procedure) atau Prosedur Operasi Standar yang berlaku serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan, pengoptimalan perolehan dari potensi daerahnya serta meningkatkan akuntabilitas perekonomian daerah agar dapat memenuhi kebutuhan dari penyelenggaraan desentralisasi pemerintahan.

Pelaksanaan pengukuran kemampuan atas keuangan suatu daerah dapat dilakukan dengan menghitung rasio keuangan yang terdiri dari beberapa bagian. Pengukuran Kemampuan keuangan dilakukan dengan menggunakan beberapa rasio keuangan yang terdiri dari: Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Derajat Ketergantungan, dan Rasio Kemandirian Keuangan serta Rasio Efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut tentu sangat membantu untuk melihat kemampuan daerah demi mewujudkan keberhasilan atas otonomi daerah. Seiring berjalannya otonomi daerah, dilihat ada banyak daerah-daerah di Indonesia yang cenderung melaksanakan pemekaran wilayah. Hal ini dijadikan peluang oleh pemerintah untuk membentuk daerah otonom baru sepanjang memenuhi prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kabupaten Merauke adalah kabupaten terluas yang menjadi daerah yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Kabupaten Merauke memiliki dataran seluas 46.791,63 Km² dan memiliki luas perairannya 5.098,71 Km². Kabupaten Merauke termasuk ke dalam daerah otonom yang terdiri dari 20 distrik/kecamatan, 11 kelurahan, dan 179 desa. Pelaksanaan urusan pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing menggunakan anggaran yang ada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dana transfer dari pusat. Namun Kabupaten Merauke masih bergantung dengan dana transfer dari pusat, sehingga persentase antara dana transfer ke daerah dengan pendapatan daerah masih besar untuk mendanai urusan pemerintahan dalam rangka mewujudkan pembangunan di daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dana Perimbangan Kabupaten Merauke
Tahun Anggaran 2016-2020 (dalam rupiah)

Tahun	DAU	DBH	DAK	Total
2016	1.232.993.695.000	107.454.208.527	176.516.666.000	1.516.964.569.527
2017	1.257.423.751.000	70.026.244.512	185.895.001.655	1.513.344.997.167
2018	1.220.130.325.000	137.845.191.063	306.239.026.603	1.664.214.542.666
2019	1.246.645.106.000	121.440.344.761	236.751.770.426	1.604.837.221.187
2020	1.136.915.623.000	91.409.402.992	225.715.267.984	1.454.040.293.976

Tabel diatas menunjukkan besarnya dana perimbangan yang diperoleh Kabupaten Merauke dengan rincian yang berbeda pada setiap tahunnya. Dalam lima tahun anggaran, dana perimbangan yang diperoleh Kabupaten Merauke mengalami fluktuasi.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, maka permasalahan seperti kontribusi Pendapatan Asli Daerah akan mempengaruhi tingkat kemampuan keuangan daerah. Hal ini perlu ditindaklanjuti agar pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan sesuai dengan semestinya. Di samping itu diperlukan suatu analisis terhadap kemampuan keuangan untuk melihat kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Merauke dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Kontribusi Pendapatan Transfer terhadap Total Pendapatan Daerah
tahun 2016-2020 (dalam jutaan rupiah)

Tahun	Pendapatan	Dana Perimbangan	Kontribusi
2016	1.967.057.544.123	1.694.632.134.683	86%
2017	1.870.593.565.150	1.477.802.217.979	79%
2018	2.185.833.251.123	1.617.965.852.066	74%
2019	1.957.657.248.594	1.455.126.234.587	74,3%
2020	1.895.272.039.386	1.518.536.181.099	80%

Berdasarkan data pada tabel di atas, menunjukkan kontribusi pendapatan transfer masih mendominasi apabila dibandingkan dengan kontribusi pendapatan asli daerah ataupun pendapatan daerah lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa masih bergantungnya Kabupaten Merauke terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Maka diperlukan sebuah analisis untuk dapat melihat kemampuan keuangan Kabupaten Merauke dan juga melihat apakah ada masalah atau faktor yang menghalangi Kabupaten Merauke untuk dapat

melaksanakan otonomi daerah dengan sesuai semestinya.

1.3. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu dari Anjar Nora Vurry, I Wayan Suwendra, Fridayana Yudiaatmaja. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui perkembangan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2004-2013 yang diukur menggunakan rasio kemandirian keuangan, efektivitas, efisiensi, Indeks Kemampuan Rutin (IKR), dan trend nya pada tahun 2014-2016. Berdasarkan hasil analisis penulis mengenai kemampuan keuangan daerah dan trend Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng, maka kesimpulan secara keseluruhan yang dapat ditarik oleh penulis berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2013 di Kabupaten Buleleng masuk kategori rendah sekali dengan pola hubungan instruktif. Dengan analisis trend untuk rasio kemandirian keuangan daerah, efektivitas, dan indeks kemampuan rutin Kabupaten Buleleng dari tahun 2004-2013 menunjukkan arah perkembangannya yang positif begitu pula dengan peramalannya di tahun 2014-2016 yang terus meningkat dan analisis trend untuk rasio efisiensi PAD Kabupaten Buleleng menunjukkan perkembangan yang cenderung menurun ke arah negatif dari tahun 2004-2013 begitu pula dengan peramalannya di tahun 2014-2016 terus menurun.

Penelitian terdahulu yang juga digunakan penulis sebagai acuan yakni dari Jovan Febriantoko. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan keuangan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi di Pulau Sumatera dengan teknik analisis data yang digunakan adalah Derajat Desentralisasi Fiskal dan jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Laporan Analisis Anggaran (LRA) menjadi alat analisis untuk dapat mengukur berapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai acuan kemandirian keuangan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan melakukan pelayanan terhadap masyarakat di daerahnya. Berdasarkan hasil analisis yang didapatkan penulis dengan penghitungan rasio kemandirian dan derajat desentralisasi fiskal Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera dapat disimpulkan bahwa Derajat Desentralisasi Fiskal pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera dapat dikategorikan belum mandiri karena rata-rata yang dimiliki hanya sebesar 35,19133%. Dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih kecil bila dibandingkan dengan total penerimaan pendapatan dan dapat diartikan di dalam penyusunan RAPBD belum didukung oleh konsep kemandirian daerah secara keuangan..

Penelitian terdahulu yang ke-3 digunakan penulis sebagai acuan yakni dari Deddy Candra, Vince Ratnawati, dan Yesi Mutia . Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan statistik kemampuan keuangan daerah antara Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif dengan menggunakan penghitungan analisis rasio Kemandirian Keuangan Daerah, rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, dan rasio Ketergantungan Keuangan Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam kapasitas keuangan lokal antara kabupaten atau kota di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Dalam penelitian ini, apabila pembenahan administrasi perpajakan dengan baik berpengaruh terhadap peningkatan PAD. Dengan Perubahan organisasi administrasi Perpajakan melalui fungsi-fungsi pada struktur organisasi berjalan sesuai fungsinya seperti melalui fungsi pengolahan data dan informasi, fungsi kontrol dan supervisi bahkan penegakan hukum melalui pemeriksaan dan penagihan aktif dapat meningkatkan penerimaan PAD di daerah

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah.

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, terdapat perbedaan fokus dan lokusnya dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni analisis kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Merauke Provinsi Papua.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Merauke dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah selama 5 tahun periode anggaran yang dilihat dari analisis rasio keuangan serta untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kemampuan keuangan daerah dan upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

II. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD Kabupaten Merauke sebagai data sekunder dan hasil wawancara dari Pejabat BPKAD Kabupaten Merauke sebagai data primer. Analisis data menggunakan metode analisis reduksi data, penyajian data, deskripsi data melalui analisis rasio keuangan: rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan, rasio ketergantungan keuangan daerah, dan rasio efektivitas pengelolaan pendapatan asli daerah, dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menggunakan teori pengamanan aset menurut teori Dadang Suwanda (2013:284)

3.1. Perkembangan Keuangan Kabupaten Merauke

3.1.1 Pendapatan Daerah

Penyesuaian tersebut lebih ditekankan terhadap penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) hal ini dikarenakan PAD merupakan komponen pendapatan yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu penetapan target pendapatan daerah diserahkan kepada pemerintah daerah dan tentunya disesuaikan dengan keadaan sumber PAD yang dimiliki oleh Kabupaten Merauke pada tahun anggaran yang bersangkutan.

Disimpulkan atas uraian yang ada di atas bahwa penetapan target pendapatan daerah itu berdasarkan analisis kondisi riil potensi daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Merauke sehingga tidak terjadi surplus atau rendahnya capaian realisasi yang tampak signifikan. Penetapan target pendapatan daerah tersebut tentunya juga melihat dan berpedoman pada anggaran tahun sebelumnya agar memiliki pemerintah daerah Kabupaten Merauke memiliki tolak ukur di dalam menetapkan target pendapatan daerah pada tahun anggaran berikutnya.

3.1.2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Merauke, tentunya menjadi salah satu bagian yang penting dalam mengukur kemampuan keuangan Kabupaten Merauke. Hal tersebut berkaitan dengan pengelolaan potensi daerah dan berbagai sumber penerimaan daerah yang secara langsung dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Merauke guna memenuhi segala kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahannya.

Salah satu pendapatan yang mendominasi total PAD Kabupaten Merauke yaitu melalui pajak daerah. Namun penerimaan pajak daerah di Kabupaten Merauke mengalami keadaan yang fluktuatif karena terjadi kenaikan yang bertahap namun kemudian turun secara

signifikan pada tahun tertentu. Pada tahun 2016 jumlah pendapatan Pajak daerah Kabupaten Merauke mencapai 25.041 juta dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 27.014 juta. Pada tahun 2018 penerimaan pajak daerah Kabupaten Merauke 31.394 juta dan kembali meningkat secara signifikan pada tahun 2019 menjadi 49.661 juta. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan yang signifikan menjadi 26.739 juta, yang tentu saja hal ini mempengaruhi tingkat PAD Kabupaten Merauke yang dihasilkan. Apabila tidak di atasi secepatnya maka akan mempengaruhi PAD Kabupaten Merauke yang dihasilkan ke depannya.

3.2. Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Merauke

3.2.1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio derajat desentralisasi Kabupaten Merauke di tahun 2016 hanya sedikit mengalami penurunan dari 8,50% menjadi 8,45% pada tahun 2017. Pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan menjadi 6,50% dan pada tahun 2019 kembali naik menjadi 8,10%. Pada tahun 2020 turun kembali menjadi 6,80% sehingga besar presentase derajat desentralisasi Kabupaten Merauke selama 5 tahun anggaran berada pada presentase 7,67%. Jika diukur dengan skala interval maka berada pada skala 0,00-10,00 diartikan bahwa rasio derajat desentralisasi Kabupaten Merauke berada pada skala interval yang sangat kurang.

3.2.2. Rasio Kemandirian Keuangan

kemandirian rasio kemandirian keuangan Kabupaten Merauke berjumlah 9,8% kemudian pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 9,7%. Pada tahun 2018 mengalami penurunan yang besar yaitu menjadi 7,8% dan kemudian meningkat menjadi 10,2% pada tahun 2019 dan kembali turun pada tahun 2020 menjadi 8,45%. Berdasarkan data tersebut maka rata-rata rasio kemandirian keuangan Kabupaten Merauke sebesar 9,19% dan berada pada skala 0-25 dapat diartikan bahwa kemandirian keuangan daerah Kabupaten Merauke berada pada skala interval rendah sekali sehingga menunjukkan adanya pola hubungan instruktif di mana peran pemerintah pusat dominan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah sedangkan tingkat kontribusi Pendapatan Asli Daerah masih begitu minim sehingga kemandirian daerah masih sangat rendah.

3.2.3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tingginya tingkat rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Merauke dengan persentase 83,24%. Jika diukur dengan skala interval seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.2 maka berada pada skala >50,00. Sehingga diartikan bahwa rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Merauke berada pada skala interval yang begitu tinggi. Keadaan ini menunjukkan bahwa masih tingginya kontribusi dari pendapatan transfer dalam total pendapatan daerah Kabupaten Merauke dan secara otomatis juga menunjukkan bahwa masih rendahnya sumbangsuh PAD Kabupaten Merauke terhadap total pendapatan daerah. Permasalahan ini sesuai dengan hasil penelitian berdasarkan hal yang diungkapkan oleh Kepala BPKAD Kabupaten Merauke yakni target Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan belum mampu untuk direalisasikan dan melampaui target selama tahun 2016-2020 serta daerah kabupaten yang memiliki komponen sumber pendapatan daerah yang lebih terbatas sehingga menimbulkan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat.

3.2.4. Rasio Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Persentase efektivitas pengelolaan PAD Kabupaten Merauke berada pada angka 94,68%. Jika dilihat dari skala interval diartikan bahwa Kabupaten Merauke dikategorikan cukup

efektif dalam pengelolaan PAD. Walaupun masih mengalami penurunan tahun anggaran 2017 dan 2020. Hal ini sesuai hasil penelitian yang ada berdasarkan uraian Subbidang Akutansi BPKAD Kabupaten Merauke yang dapat disimpulkan bahwa efektivitas ini tidak hanya dipengaruhi oleh banyaknya potensi daerah, melainkan juga dipengaruhi oleh efektivitas pengelolaan oleh sumber daya yang ada.

3.3. Faktor Penghambat yang Mempengaruhi Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Merauke

Faktor penghambat yang berasal dari dalam maupun dari luar lingkup pemerintah daerah Kabupaten Merauke itu sendiri yang dapat memberikan dampak negatif bagi kemampuan keuangan daerah Kabupaten Merauke apabila tidak diawasi dengan baik. Adapun faktor penghambat tersebut, yakni sebagai berikut:

- a. Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah belum Optimal
Pemerintah daerah Kabupaten Merauke dalam menghadapi permasalahan tersebut tentunya dapat merencanakan sejumlah program maupun kegiatan yang ditujukan agar pemungutan pajak dan retribusi daerah lebih optimal sehingga menambah hasil daripada Pendapatan Asli Daerah sesuai target yang diharapkan. Hal-Hal yang dapat dilakukan seperti manajemen sistem dan prosedur administrasi dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah guna menghindari timbulnya kesulitan masyarakat dalam proses pembayaran pajaknya masing-masing.
- b. Potensi Daerah Kabupaten Merauke belum dimanfaatkan secara optimal
Pemerintah daerah Kabupaten Merauke perlu mengoptimalkan pemanfaatan berbagai potensi daerah yang ada di Kabupaten Merauke. Kabupaten Merauke memiliki kondisi geografis yang didominasi oleh kawasan pertanian dan perkebunan sehingga apabila dimanfaatkan dan dikelola dengan baik maka hal tersebut dapat menjadi salah satu sumber penerimaan bagi PAD Kabupaten Merauke. Pemerintah Kabupaten Merauke dapat lebih memperhatikan keadaan para pekerja seperti buruh tani dan perkebunan yang ada, memberikan sejumlah bantuan fasilitas yang akan menunjang hasil panen yang Lebih baik.
- c. Ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke terhadap Dana Transfer
Ketergantungan pemerintah Kabupaten Merauke terhadap dana transfer menjadi faktor penghambat eksternal yang mempengaruhi kemampuan keuangan daerah dikarenakan transfer pemerintah pusat atau provinsi memberikan kontribusi yang Lebih dominan dalam total pendapatan daerah Kabupaten Merauke dibandingkan dengan PAD Kabupaten Merauke sendiri. Dilihat pada anggaran pendapatan Kabupaten Merauke tahun anggaran 2015-2019 masih bergantung dan sangat didominasi oleh besarnya kontribusi dana yang berasal dari pihak eksternal, dimana pemerintah pusat berperan besar dalam memfasilitasi kegiatan dan program pemerintah daerah Kabupaten Merauke

3.4. Faktor Pendorong yang Mempengaruhi Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Merauke

Salah satu sumber penerimaan terbesar Kabupaten Merauke yakni Pajak Daerah, dalam pelaksanaan pemungutannya sudah dibuat berbagai kebijakan guna pencapaiannya menjadi maksimal. Hal tersebut diwujudkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Merauke dengan membuat berbagai strategi agar kontribusi Pajak daerah Kabupaten Merauke dapat meningkat setiap tahunnya secara signifikan agar turut mewujudkan kemampuan keuangan daerah yang diharapkan, dengan berbagai cara sebagai berikut:

1. Melakukan konfirmasi terhadap wajib Pajak;

2. Pembentukan tim terpadu;
3. Penilaian NJOP PBB dan;
4. Melakukan Himbauan dan Sosialisasi atas Pajak Daerah

3.5. Upaya Pemerintah Daerah Untuk Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah

Beberapa strategi dan langkah yang ditempuh oleh pemerintah daerah Kabupaten Merauke guna meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Merauke adalah sebagai berikut:

- a. Pemuktahiran data wajib pajak dan data perizinan usaha yang telah diberikan;
- b. Pendataan wajib pajak maupun retribusi daerah yang baru;
- c. Penetapan ulang besaran yang harus dibayar oleh wajib pajak maupun retribusi;
- d. Melakukan kegiatan monitoring pajak restoran/rumah makan maupun tempat yang menggunakan perizinan usaha;
- e. Meningkatkan pengawasan terhadap penerimaan pajak , retribusi hingga hasil penjualan barang milik daerah yang termasuk lain- lain Pendapatan Asli D yang sah;
- f. Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terutama para wajib pajak terhadap kewajibannya, melalui kegiatan penyuluhan Perda tentang pajak dan retribusi daerah
- g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal dan dinas terkait daerah

Sementara kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Merauke adalah:

- a. Menyebarkan Surat Pembayaran Objek Pajak (SPOB) PBB ke masyarakat yang memiliki aset berupa tanah dan bangunan tetapi belum dikenakan PBB;
- b. Menerbitkan Instruksi Bupati Merauke agar seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke menjadi panutan membayar PBB-P2;
- c. Mengadakan rapat evaluasi pencapaian penerimaan PBB-P2 dengan para Kepala OPD, Camat dan Lurah setiap 1 bulan sekali;
- d. Memberikan insentif kepada Kepala Kampung/Lurah dan Camat yang persentase pelunasan PBB-P2 di wilayahnya paling tinggi.

Salah satu contoh yang menunjukkan bahwa saat ini pemerintah daerah kabupaten Merauke sedang giatnya guna meningkatkan realisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah adalah dengan melakukan sosialisasi terhadap para wajib pajak agar memiliki kesadaran yang tinggi akan pembayaran pajak daerah dan juga mengembangkan teknologi berbasis online dalam pembayaran pajak daerah dengan harapan dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak tersebut.

3.6. Diskusi Temuan Utama

belum optimalnya penggalan potensi daerah yang ada dan kemampuan sumber daya aparatur yang ada dalam memanfaatkan dan mengelola potensi yang ada di daerah sehingga presentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah masih lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan transfer yang diterima dari pemerintah pusat.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, maka permasalahan seperti kontribusi Pendapatan Asli Daerah akan mempengaruhi tingkat kemampuan keuangan daerah. Hal ini perlu ditindaklanjuti agar pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan sesuai dengan semestinya. Di samping itu diperlukan suatu analisis terhadap kemampuan keuangan untuk melihat

kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Merauke dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

3.7. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan temuan lainnya adalah adanya Potensi Daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Merauke belum efektif dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah Merauke. Pemerintah daerah Kabupaten Merauke perlu mengoptimalkan pemanfaatan berbagai potensi daerah yang ada di Kabupaten Merauke. Kabupaten Merauke memiliki kondisi geografis yang didominasi oleh kawasan pertanian dan perkebunan sehingga apabila dimanfaatkan dan dikelola dengan baik maka hal tersebut dapat menjadi salah satu sumber penerimaan bagi PAD Kabupaten Merauke.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan penelitian maka simpulan yang dipaparkan pada penelitian ini yaitu:

Hasil analisis keuangan secara keseluruhan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Merauke tahun anggaran 2016-2020, maka kemampuan keuangan daerah masih kurang dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam jangka waktu tahun anggaran 2016-2020 dengan rincian analisis. Analisis faktor penghambat tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Merauke yaitu, antara lain: Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah belum optimal, potensi daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, dan tingginya tingkat ketergantungan daerah Kabupaten Merauke terhadap dana transfer.

upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah, yakni : Menggali potensi-potensi daerah yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah, adanya kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi Pendapatan Asli Daerah dan inovasi baru dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Keterbatasan Penelitian penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu keterbatasan waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan analisis kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Merauke.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada BPKAD Kabupaten Merauke beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Chabib, S; Rochmansjah H. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik* Bandung: Fokus Media.

Djaenuri, A. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Elsye, Rosmery. 2013. *Desentralisasi Fiskal Manajemen Pemerintahan*. Jatinangor: Alqaprint.
- Halim, A. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamsiah, A. 2019. *Manajemen Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah*. Bogor: Azkiya Publishing.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mahmudi. 2019. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Moenek, R; Suwanda D. 2019. *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sinurat, Marja. 2017. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____. 2017. *Perencanaan dan Penganggaran Daerah*. Bandung: Pustaka Rahmat
- Hermawan, Diki. 2019. *Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bandung Barat*. Jakarta: IPDN. Febriantoko, Jovan. 2017. *Analisis Kemampuan Keuangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Di Pulau Sumatera*. Seminar Nasional Teknologi Informasi Bisnis dan Desain.
- Nora, Anjar. dkk 2018. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dan Trend Pendapatan Asli Daerah Pemerintahan Kabupaten Buleleng*. Bisma Jurnal Manajemen
- Sinurat dan Panjaitan. 2019. *Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2018: Studi Kasus Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik. No. 2.
- Wenur, Gebriany. 2013. *Analisis Kemampuan Pendapatan Asli Dalam Membiayai Belanja Daerah Kota Bitung*. Jurnal Emba.